

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Keadilan

Kata keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice* memiliki persamaan berbagai bahasa memiliki persamaan arti dengan *justitia* dalam bahasa latin; *juste* dalam bahasa Perancis; *justo* dalam bahasa Spanyol; *gerecht* dalam bahasa Jerman.

¹² Namun jika kita lihat definisi yang diutarakan oleh kamus besar Indonesia¹³ bahwa keadilan itu adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Menurut pendapat Henry Campbell Black mengatakan bahwa keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang.¹⁴

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita¹⁵

Tujuan Hukum di antaranya yaitu teori Keadilan, yang dimana jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam

¹² Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm. 90

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengemabagan Bahasa. 1989. Jakarta. Balai Pustaka, hlm. 7. ;Kamus Besar Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/adil>. diunduh 22 Juni 2015.

¹⁴ Henry Campbell Black. 1982. *Black's Law Dictionary*, Minnesota, USA: West Publishing Co. hlm. 1002.

¹⁵ Moh.Mahfud MD. 2009.*Politik Hukum di Inonesia*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hlm. 2

macam tentang teori keadilan, mulai keadilan menurut hukum Islam¹⁶, teori keadilan menurut John Stuart Mill, teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut Robert Nozick, teori keadilan menurut Katholikisme, teori keadilan menurut Reinhold Niebuhr, teori keadilan menurut Jose Poforio Miranda.¹⁷

B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan

1. Pengertian Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yaitu dapat dikatakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan guna terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mempunyai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁸ Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁹

Apabila membahas masalah terkait berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan

¹⁶ Asmawi. 2006. *Filsafat Hukum Islam*. Surabaya. Penerbit eLKAF Press. Hlm. 45.

¹⁷ Karen Lebacqz. 1989. *Teori-Teori Keadilan*, Bandung. Penerbit Nusa Media. Hlm. 3

¹⁸ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 140

¹⁹ Ibid, h.141

kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum. Menurut Oemar Seno Adji²⁰ mengatakan bahwa :

“Dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut *Eigen Enzicht* ataupun *Eigen Goeddunken* secara *concrete*”.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan berupa pembedaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak diatur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1886, dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepaik terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke jalan sesat ataukah perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus ditetapkan seluasluasnya sehingga

²⁰ Seno Aji, 1984. *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, Hal 8.

meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai”.²¹

Tugas utama hakim adalah mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan merumuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Putusan hakim merupakan pertanggung jawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun kepadanya masyarakat, tetapi lebih penting lagi putusan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Umum Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan,

²¹ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet 4. Alumni, Bandung, Hal 47-48.

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP tentang putusan bebas dan putusan lepas yang berbunyi :

- “(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.*
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*

Yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu dengan “Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan”, maka dalam hal ini tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim yang atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.²²

Dalam hal untuk menghasilkan suatu putusan, langkah utama yang dilakukan adalah Majelis Hakim melakukan musyawarah yang tertutup untuk umum guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan dalam musyawarah. Apabila dengan Putusan ini Terdakwa menolak putusan tersebut maka dapat dilakukan suatu Upaya hukum biasa (Banding dan

²² Andi Hamzah, 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hal 167

Kasasi) dan Upaya luar biasa (Kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali).

Suatu putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila²³:

- 1) Diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 2) Dihadiri oleh Terdakwa;
- 3) Memberitahu Hak Terdakwa, yaitu :
 - a. Menerima dan menolak putusan;
 - b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dengan jangka waktu yang ditentukan;
 - c. Meminta perkara diperiksa di tingkat Banding dengan jangka waktu yang telah ditentukan apabila Terdakwa menolak putusan tersebut.

Dengan ini tidak terlepas dengan adanya Eksekusi, yang di mana definisi Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilakukan oleh Oditur yang dimana Panitia telah mengirimkan salinan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan tersebut juga dapat diuraikan sebagai berikut ini:

- a. Pelaksanaan pidana mati yang dilakukan tidak di depan umum (Pasal 255 KUHPM)

²³ Derwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 134

- b. Pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Permasyarakatan Militer atau tempat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 256 KUHPM)
- c. Pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan sungguh-sungguh (Pasal 257 KUHPM)
- d. Pidana denda (Pasal 258 KUHPM)
- e. Perambasan barang bukti (Pasal 259 KUHPM)
- f. Ganti rugi (Pasal 260)
- g. Membayar biaya perkara persidangan oleh Terdakwa (Pasal 261 KUHPM).

Dalam ranah pelaksanaan Eksekusi ini juga tidak terlepas dari pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dan di dalam pelaksanaannya dibantu oleh Hakim serta di dalam pengadilan militer mempunyai daluwarsa pelaksanaan pidana yang sama dengan pengadilan umum, yang sudah jelas diatur di dalam Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.*
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.*
- (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.*
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.*

C. Tinjauan Umum Yuridiksi Kewenangan Pengadilan

Berbicara terkait Yuridiksi Kewenangan sama dengan membahas terkait Kompetensi Pengadilan itu sendiri, dalam hal ini kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).

Dengan demikian jumlah pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) yang ada, jumlah pengadilan tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan tingkat I (provinsi), sedangkan Mahkamah Agung (kasasi) hanya ada di ibukota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada. Adapun beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu

pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yaitu yang pertama dapat dilihat dari pokok sengketa. Kedua dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi dan yang ketiga dengan melakukan pembedaan atas Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.

Dapat dilihat dari pokok sengketa, apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).

Menurut Sjahran Basah pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan melalui bagan berikut²⁴:

- a. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan:
 1. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/setingkat. Contoh; Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (Umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.
 2. Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi.

²⁴ Sjahran basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

Contoh; Pengadilan Negeri (Umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

- b. Distribusi berkaitan dengan pemberian wewenang, yang bersifat terinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh; Pengadilan Negeri Bandung dengan Pengadilan Negeri Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Pembagian yang lain adalah pembagian atas kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.

1. Kompetensi Absolut

Menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 10 UU 35/1999 kita mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni; peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

- A. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1999).
- B. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah (Pasal 49 UU 50/2009).
- C. Kompetensi Absolut Dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana yang dilakuka

oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara , dan kepolisian).

D. Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha

Negara adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU 09/2004 PTUN).

2. Kewenangan Relatif Pengadilan

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

Persoalannya adalah, bagaimana jika seorang tergugat memiliki beberapa tempat tinggal yang jelas dan resmi. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu PN tempat tinggal tergugat tersebut. Misalnya, seorang tergugat dalam KTP-nya tercatat tinggal di Tangerang dan memiliki ruko di sana, sementara faktanya ia juga tinggal di Bandung. Dalam hal demikian, gugatan dapat diajukan baik pada PN di wilayah hukum Tangerang maupun Bandung. Dengan demikian, titik pangkal menentukan PN mana yang berwenang mengadili perkara adalah tempat tinggal tergugat dan bukannya tempat kejadian perkara (*locus delicti*) seperti dalam hukum acara pidana.

Dalam hal suatu perkara memiliki beberapa orang tergugat, dan setiap tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat. Kepada penggugat diberikan hak opsi, asalkan tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing tinggal di daerah hukum PN yang berbeda. Jika tergugat terdiri lebih dari satu orang, dimana tergugat yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok (*debitur principal*) sedangkan tergugat lain sebagai penjamin (*guarantor*), maka kewenang relatif PN yang mengadili perkara tersebut jatuh pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok tersebut.

Opsi lainnya adalah gugatan diajukan kepada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Agar tidak dapat dimanipulasi oleh penggugat, tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat itu perlu mendapat surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Misalnya, surat keterangan dari kepala desa. Jika obyek gugatan mengenai benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada PN yang daerah hukumnya meliputi benda tidak bergerak itu berada. Jika keberadaan benda tidak bergerak itu meliputi beberapa wilayah hukum, maka gugatan diajukan ke salah satu PN atas pilihan penggugat. Namun jika perkara itu merupakan perkara tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pasal 1365 KUHPerdara yang sumbernya berasal dari obyek benda tidak bergerak, maka tetap berlaku asas *actor sequitur forum rei* (benda tidak bergerak itu merupakan “sumber perkara” dan bukan “obyek perkara”). Misalnya, tuntutan ganti rugi atas pembaran lahan perkebunan.

Dalam perjanjian, terkadang para pihak menentukan suatu PN tertentu yang berkompetensi memeriksa dan mengadili perkara mereka. Hal ini, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bisa saja dimasukkan sebagai klausul perjanjian, namun jika terjadi sengketa, penggugat memiliki kebebasan untuk memilih, apakah PN

berdasarkan klausul yang ditunjuk dalam perjanjian itu atau berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*.

3. Tinjauan Umum Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Hukum Pidana Militer.

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri.

SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut *justiabel*, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukkan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.²⁵

Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justiable* (yang harus dihukum) di peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan semua peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan suatu larangan dan keharusan, serta pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan pidana dan dalam hal ini tindak pidana militer, yang menentukan dalam hal apa serta kapan pelanggaran itu bisa

²⁵ SR. Sianturi, op.cit, hal: 18

dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan serta pelaksanaannya demi terwujudnya keadilan dan ketertiban hukum.²⁶

Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya Hukum Pidana Militer disamping merupakan bagian dari Hukum Militer serta merupakan bagian dari hukum Pidana pada umumnya. Bahkan juga termasuk dalam asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* karena Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus yang dapat mengesampingkan hukum pidana yang umum.

2. Pengertian Tindak Pidana Militer.

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Militer maka perlu juga untuk kita memahami betul pengertian dari Tindak Pidana, Menurut para pakar tentang pengertian tindak pidana, antara lain :

- a. Menurut Simons bahwa Hukum pidana itu dibagi dalam dua bagian yaitu hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif.²⁷ Yang dimaksud hukum pidana objektif adalah merupakan suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan semua keharusan, yang atas pelanggaran oleh negara atau suatu masyarakat dan juga hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum positif, *ius poenale* atau *ius constitutum* dan hukum pidana subjektif atau

²⁶ Santuri(II), 1995. *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta. Penerbit AHAEM-PETEHAEM. Hlm.27

²⁷ Buchari Said H. 2009. *Hukum Pidana Materil (Substantive Criminal Law)*. FH Unpas. Bandung. hlm. 1.

ius puniendi merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk menjatuhkan ancaman pidana terhadap pelanggaran hukum pidana objektif.

b. Menurut Pompe Hukum pidana merupakan: “keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.”²⁸

c. Menurut Moeljatno yang mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar–dasar dan aturan–aturan untuk²⁹:

- 1) Menentukan perbuatan–perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilanggar disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut. Ini disebut dengan perbuatan pidana (istilah yang dipergunakan beliau sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*) atau *criminal act*.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal–hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan–larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini disebut dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility, criminal liability*).
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ini merupakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana, *criminal procedure law*.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Tindak Pidana yang telah dilarang oleh aturan hukum yang akan disertai sanksi yang berupa suatu tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

²⁸ E. Utrecht. 1960. Hukum Pidana, Penerbit Universitas. Hlm. 257.

²⁹ Moeljatno.2000. *Azas – Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 1.

tersebut.³⁰ Dari penjelasan diatas ada pula pengertian militer adalah orang-orang yang ditugaskan berperang dan menjaga kedamaian negara. Dari pengertian tersebut jika digabungkan maka menjadi tindak pidana militer yaitu suatu perbuatan yang jika dilanggar oleh anggota militer akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Militer dan peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Macam-macam Tindak Pidana Militer

Tindak pidana/delik dibedakan antara lain tindak pidana umum (*Commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*Delicta proparia*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer.³¹

Pada umumnya suatu Tindak Pidana Militer terdapat dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang dibagi menjadi dua macam , antara lain³² :

- a. Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan yang terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer yang menghendaki tindakan tersebut sebagai Tindak Pidana. Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan didalam tindak pidana militer murni yaitu:

³⁰Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 71

³¹Moch Faisal Salam, 2006 . *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju. Hlm 27

³² Sianturi(II). 1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Alumni AHAEM-PETEHAEM. Jakarta. Hlm.19

- 1) Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinasny.
- 2) Militer yang pergi dengan maksud melarikan diri dari bahaya perang
- 3) Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.
- 4) Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

b. Tindak Pidana Campuran adalah suatu tindakan terlarang yang sudah ditetapkan di dalam peundang-undangan lain, tetapi diatur kembali di dalam KUHPM karena keadaan khas militer.

4. Jenis Sanksi Tindak Pidana Militer

Menurut di dalam ketentuan KUHPM pada Pasal 6 telah dijelaskan bahwa terdapat pidana pokok (utama) dan pidana tambahan, antara lain :

a. *Pidana Pokok (Utama) terdiri dari :*

- 1) *Pidana Mati*
- 2) *Pidana Penjara*
- 3) *Pidana Kurungan*

b. *Pidana Tambahan terdiri dari :*

- 1) *Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata*
- 4) *Pencabutan hak-haknya yang telah disebutkan di dalam Pasal 35 ayat (1) nomor 1,2,3 KUHP tentang Pencabutan Hak Terpidana.*

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana Militer

1. Pengertian Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.³³

³³ Moch Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Mandar Maju .2006. *Hlm* 27

Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) di atur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara HAPMIL dan KUHAP memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, HAPMIL tidak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP, aturan-aturan yang di dalam KUHAP yang tidak terdapat dalam HAPMIL otomatis berlaku bagi HAPMIL dengan catatan tidak bertentangan baik tersurat maupun yang tersira. Maka dapat disimpulkan bahwasannya hukum acara pidana militer adalah suatu aturan/ hukum yang mengatur sistem atau tata cara peradilan militer mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan pidana oleh Oditur jika terjadi delik (perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena melanggar ketentuan undang-undang, tindak pidana).

2. Proses Penyelesaian Perkara di Dalam Peradilan Militer .
 - a. Penyidikan.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *Opsporin*.

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*"

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.³⁴

Maka dapat disimpulkan bahwasannya Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan angkatan bersenjata Republik Indonesia dalam hal menuntut sesuai cara yang diatur di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang bertujuan untuk menemukan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 69 KUHPM. Yang dimana dalam Pasal tersebut adanya Hak penyidik yang diberikan pada:

- 1) Para Anjak Terhadap anak buahnya (Anjak)
- 2) Polisi militer (POM).

³⁴ M. Husein harun, Op,Cit hal 58

- 3) Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk ³⁵:

- 1) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- 2) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
- 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.

b. Penyerahan Perkara

Di dalam hal ini apabila sudah selesainya melakukan penyidikan , maka dengan ini penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Oditur, Setelah menerimanya langkah selanjutnya yaitu Oditur segera meneliti hasil Penyidikan tersebut. Apabila dirasa persyaratan formal kurang lengkap maka Oditur meminta Penyidik untuk melengkapi.

Permintaan tersebut dapat berupa lisan atau secara tulisan, Bila hasil penyidikan dirasa belum cukup, maka Oditur melakukan Penyidikan tambahan atau mengembalikan dengan disertai petunjuk yang harus dilengkapi oleh Penyidik.³⁶

Setelah dilakukannya penelitian terkait berkas perkara, maka Oditur segera membuat serta menyampaikan Saran Pendapat Hukum (SPH), kepada Perwira Penyerah Perkara yaitu ANKUM yang isi di

³⁵ Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin . 1990. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta. Hlm 17

³⁶ Derwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 77

dalamnya dapat berupa permintaan sebagaimana tertera di dalam Pasal 125 ayat (1) KUHPM, antara lain:

- 1) Perkara diserahkan kepada Pengadilan Militer
- 2) Diselesaikan menurut Disiplin Militer Prajurit
- 3) Ditutup demi kepentingan hukum, umum atau militer.

Setelah adanya dasar pendapat hukum dari Oditur di atas, maka sesuai Pasal 126 ayat (1) KUHPM Tentang Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan, yang tertera dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1997:³⁷

- 1) Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPERA)
- 2) Surat Keterangan Penyelesaian Hukum Disiplin Prajurit (SKEPKUMPLIN)
- 3) Surat Keputusan Perkara Ditutup Demi Kepentingan Hukum (SKEPTUPRA).

c. Persidangan

Di dalam tahap persidangan, setelah pengadilan militer menerima berkas perkara dari Oditur, maka kepala Pengadilan Militer segera mempelajari berkas perkara tersebut, dengan ini bertujuan untuk melihat apakah hal ini termasuk wewenang pengadilan yang dipimpin guna untuk memeriksa atau tidaknya suatu perkara tersebut yang telah jelas tertera di dalam Pasal 132 KUHPM Undang-Undang No. 37 Tahun 1997, yang berbunyi :

³⁷ Derwan Prinst. 2003. *Peradilan Militer*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 78

“Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.”

Dalam Persidangan Militer ini sedikit adanya perbedaan dengan Pengadilan Umum di dalam persidangan, yaitu terletak pada hirarki alat bukti, jika di dalam Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Yang dapat digaris besar dalam hal ini yaitu berupa saksi, para ahli, surat, petunjuk dan pengakuan. Sedangkan pada Peradilan Militer alat buktinya berupa saksi, para ahli, terdakwa, surat dan petunjuk.

5. Tinjauan Umum Tentang Hukum Disiplin Prajurit Militer

1. Pengertian Hukum Disiplin Dalam Militer Secara Umum

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani, pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi Prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI, karena sifatnya yang ‘harus’ tadi, maka perlu

diberlakukan suatu peraturan dan ketentuan demi lancarnya penegakan disiplin dalam tubuh organisasi militer.

Definisi Hukum Disiplin Prajurit adalah seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai sikap, penampilan serta tingkah laku dari seorang militer atau bisa disebut sebagai orang yang ditundukkan pada Hukum Disiplin Militer yang harus sesuai dengan seluruh perintah kedinasan, peraturan kedinasan serta kelayakan, ketertiban dan tata kehidupan militer yang terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi hukuman.³⁸

Terdapat pula pada Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Yang tertera dalam Pasal 1 angka ke -1 , dijelaskan bahwasannya disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran atas Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Asas-Asas Pembentukan Hukum Disiplin Prajurit.

Jika kita pahami bahwasannya sangat penting untuk para Prajurit Khususnya mengetahui dasar terkait Hukum Disiplin Prajurit yang tertera pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Prajurit , yang dimana tertera asas-asas yang wajib untuk di jalankan, seperti tertera jelas di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2014, yang berbunyi :

³⁸ Sianturi(1), op.cit., Hlm.26

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. Keadilan, yang berarti kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang ;*
- b. Pembinaan, yang dapat diartikan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik;*
- c. Persamaan di hadapan hukum, yaitu asas di mana setiap orang tunduk padahukum peradilan yang sama;*
- d. Praduga tak bersalah, yaitu asas di mana seseorang dianggap tidak bersalahhingga pengadilan menyatakan bersalah;*
- e. Hierarki, yaitu dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
- f. Kesatuan komando, yaitu membantu mengamankan konsepgaris wewenang yang tidak terputuskan;*
- g. Kepentingan Militer , dapat diartikan dengan bahwa di dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan;*
- h. Tanggung jawab, juga dapat diartikan dengan berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya;*
- i. Efektif dan efisien, yang dapat disimpulkan dengan mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan tepat dan;*
- j. Manfaat ,dapat diartikan bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya .*

Telah dijelaskan menurut Amiroeddin Sjarif bahwasannya Asas-asas dalam pembentukan Hukum Disiplin Prajurit, antara lain³⁹ :

- a. Asas Komandan bertanggungjawab penuh terhadap baik atau buruknya kesatuan yang dipimpinnya.
- b. Asas keseimbangan kepentingan militer dengan kepentingan umum.
- c. Asas mendidik.
- d. Asas pertanggungjawaban mutlak.
- e. Asas sederhana dan cepat.

³⁹ Amiroeddin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 32

3. Macam-Macam Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Prajurit.

Jika kita cermati bahwasanya didalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tertera adanya suatu jenis-jenis pelanggaran, baik jenis pelanggaran ataupun jenis hukuman, semua itu sudah tertera jelas di dalam Pasal 8 Undang-Undang No.25 Tahun 2004 dan Pasal 9 Undang-Undang No.25 Tahun 2004, yang dimana berbunyi :

Pasal 8:

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan*
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.*

Pasal 9 :

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
- c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Terdapat dua poin terkait macam-macam jenis pelanggaran hukum disiplin prajurit , yaitu :

- a. Pelanggaran Hukum Disiplin Murni, adalah setiap perbuatan yang tidak merupakan suatu tindak pidana , tetapi berhubungan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau

perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara kehidupan prajurit TNI.

- b. Pelanggaran Hukum Disiplin Tida Murni, adalah setiap perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

6. Tinjauan Umum Sanksi Administrasi Militer

1. Pengertian Sanksi Administrasi Militer Secara Umum

Sebelum membahas secara detail terkait pengertian umum sanksi administrasi maka perlunya untuk mengetahui apa definisi hukum administrasi militer terlebih dahulu, yaitu segala ketentuan hukum yang mengatur hubungan dan akibat hukum antara yang berkuasa (komandan) dengan yang dikuasai (bawahan) mengenai suatu masalah yang ada kaitannya dengan kekuasaan itu sendiri.⁴⁰

Maka dalam hal ini komandan selaku atasan dapat mengambil suatu kebijaksanaan terhadap bawahannya antara lain⁴¹ :

- a. Pemberhentian dengan hormat, tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara.
- b. Penundaan pangkat
- c. Membebaskan diri dari tugas jabatan
- d. Menentukan ganti rugi.

Di dalam tata cara pemberian sanksi administrasi di dalam lingkup militer akan di ambil sepenuhnya oleh ANKUM, Pengertian ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum) adalah atasan yang diberikan

⁴⁰ Sianturi(1), op.cit.. Hlm. 31

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 11

wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang atasannya.⁴²

Ada pula pengertian Sanksi Administratif TNI-AU bagi prajurit yang terlibat kasus pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang telah tertera di dalam PERKASAU Pasal 1 No.34 Tahun 2018, yang berbunyi “Sanksi/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”.

2. Asas-Asas Sanksi Administratif TNI-AU Bagi Prajurit Yang Terlibat Khusus Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana.

Dalam hal ini bahwasannya dapat dilihat secara detail terkait apa saja asas-asas yang wajib dilaksanakan sesuai yang tertera di dalam PERKASAU No.34 Tahun 2018, yang dimana akan dijelaskan terkait sanksi yang telah tertera di dalam PERKASAU Pasal 2 No.34 Tahun 2018 dalam penerapan sanksi administrasi, antara lain:

- a. *Legalitas adalah penjatuhan sanksi administratif kepada prajurit TNI-AU yang terlibat kasus harus berdasarkan kepada peraturan yang berlaku.*
- b. *Kepastian hukum adalah setiap penjatuhan sanksi administratif harus di tuangkan dalam bentuk keputusan sanksi oleh ANKUM yang berwenang.*
- c. *Mendidik adalah penjatuhan sanksi administratif sebagai koreksi dalam rangka pembinaan personel dan memberikan efek jera bagi pelaku prajurit TNI-AU yang telah dijatuhi hukuman pidana/disiplin.*
- d. *Keadilan adalah setiap prajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan sanksi administratif, sehingga dapat*

⁴² PERKASAU No.34 Tahun 2018 . poin 7. Hlm. 3

memberikan kedilan bagi prajurit yang lain dalam pembinaan karir selanjutnya.

- e. Keterbukaan adalah pelaksanaan penjatuhan saksi administratif, mulai tahap pembahasan, keputusan dan pelaksanaan saksi administratif deilaksanaan dengan penuh keterbukaan dimana semua unsur terkait yang dilibatkan secara fungsional harus dapat bertukar pendapat secara jujur berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.*
- f. Keseimbangan adalah setiap perajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran akan dipatuhi saksi administratif sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh saksi yang dijatuhi akan berpengaruh terhadap pembinaan karir personel yang bersangkutan ,dan*
- g. Tidak berlaku surut (Non-Retroaktif) yang setiap Prajurit TNI-AU terikat kepada peraturan ini sejak diberlakukan ,untuk perkara yang terjadi sebelum peraturan ini ditetapkan dan telah selesai menjalani sanksi administratif,peraturan ini tidak dapat diberlakukan.*

3. Penggolongan Pelanggaran dan Jenis Sanksi Administratif TNI-AU Menurut Peraturan Kepala Staf TNI-AU.

Dapat dipahami bahwasannya jenis Sanksi Administratif adanya sanksi ringan, sanksi sedang serta sanksi ringan. Dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya. Dikategorikan sebagai pelanggaran ringan jika hal yang dilakukan dapat disampaikan dengan teguran baik lisan atau non lisan, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit TNI tingkat sedang jika menimbulkan dampak negatif pada institusi TNI dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin prajurit TNI tingkat berat, yang menimbulkan dampak negatif pada pemerintah dan negara.

Maka ada pula Penggolongan dan jenis sanksi Administrtif yang jelas tertera di dalam PERKASAU Pasal 10 No. 34 Tahun 2018, antara lain :

- 1) Penggolongan pelanggaran untuk penerapan sanksi administratif sebagai berikut :*

- a. *Golongan I adalah Prajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.*
 - b. *Golongan II adalah Prajurit TNI-AU yang melakukan tindak pidana.*
- 2) *Jenis hukuman pelanggaran golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :*
 - a. *Teguran.*
 - b. *Penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari.*
 - c. *Penahanan disiplin berat paling lama 21 hari.*
- 3) *Jenis hukuman pelanggaran golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :*
 - a. *Pidana denda diluar pelanggaran lalu lintas.*
 - b. *Pidana bersyarat.*
 - c. *Pidana penjara sampai dengan 3 bulan.*
 - d. *Pidana penjara 3 sampai dengan 6 bulan.*
 - e. *Pidana penjara lebih dari 6 bulan.*

7. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Pasal 378 KUHP

Istilah dari “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Sedangkan dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat ditafsirkan sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam

delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP.

Adapun menurut para ahli dalam menyimpulkan suatu tindak pidana , antara lain:

a) Menurut R. Tresna tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai :

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya.”⁴³

b) Menurut Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaar feit*” dengan istilah perbuatan pidana yang memberikan arti ialah sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu”.⁴⁴ dan “Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat”.⁴⁵

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁴³ R. Tresna. 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*. Tiara. Jakarta. Hlm. 27.

⁴⁴ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 20

⁴⁵ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm. 21

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “

Tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam ringkasan terdahulu hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang telah dirugikan, yang telah diatur di dalam Bab VII KUHP tentang pengajuan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Wujud perbuatan tindak pidana dirumuskan secara formal (wujud perbuatan) dan material (akibat dari perbuatan).⁴⁶

2. Sifat Melawan Hukum Dan Asas Legalitas

Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela dari suatu perbuatan, sifat tercela dapat bersumber dari Undang-Undang dalam masyarakat.⁴⁷ Dalam hal ini Tindak Pidana dalam perspektif hukum selalu dikaitkan dengan asas Legalitas. Asas Legalitas ini telah diatur di dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiada satu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas meenghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama. Bandung. Hlm.30

⁴⁷ Adami Chazawi (1), op.cit., Hlm. 86

pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Maka dari itu asas Legalitas melarang penerapan hukum pidana secara surut (*Retroaktif*)⁴⁸. Dan dalam hal ini asas Legalitas membatasi secara rinci dan cermat suatu tindakan apa saja yang dapat dipidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Sesuai Pasal 378 KUHP

Berdasarkan bunyi di dalam Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

- a. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata sebagai berikut :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan

- b. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas sebagai berikut :

Unsur barang siapa yaitu unsur yang menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar

⁴⁸ Fajrime A. Gofar. 2005. *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP Positio Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*, ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta. Hlm. 7

pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsure subyektif maupun unsure obyektifnya.

Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan secara teori adalah mencakup makna *willenenwittens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

- a. “Menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- b. “Mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut

tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁴⁹



⁴⁹ JP Arsyad, *Unsur – Unsur Dalam Tindak Pidana Penipuan*, <http://jparsyad.com/unsur-unsur-dalam-tindak-pidana-penipuan/> diakses pada 4 April 2018.